
INDIVIDUALIZED EDUCATIONAL PROGRAM DALAM IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF

oleh:

N. Dede Khoeriah

Program Studi Pendidikan Luar Biasa
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Islam Nusantara, Bandung

ABSTRAK

Esensi artikel ini menggambarkan Individualized Education Program (IEP) atau dalam bahasa disebut program pendidikan Individual (PPI) dalam implementasi pendidikan inklusif yaitu pendidikan untuk semua. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah memaparkan PPI sebagai alat profesional bagi guru dalam menerapkan sistem pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) yang berada di sekolah reguler. Makalah ini memaparkan konsep PPI dan implementasinya dalam pendidikan inklusif dengan mengacu pada tujuh langkah proses dalam menyusun program yang sesuai dengan kelebihan dari peserta didik dan berisi lima komponen dalam implementasi pendidikan inklusif.

Kata Kunci : *Individualized Educational Program, Pendidikan Inklusif, Anak Berkebutuhan Khusus*

Pendahuluan

Individualized Educational Program (IEP) atau program pendidikan individualisasi (PPI) merupakan alat profesional untuk melindungi prinsip-prinsip yang tertuang dalam konsep pendidikan Inklusif. Program pendidikan individualisasi muncul seiring dengan dinamika perkembangan layanan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di dunia, khususnya perkembangan layanan bagi anak berkebutuhan khusus di Amerika Serikat. IEP adalah salah satu unsur penting, yang merupakan karakteristik dari konsep pendidikan untuk semua yaitu dimana anak-anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama anak-anak reguler, disebut dengan pendidikan mainstreaming.

Mainstreaming dalam pendidikan berkebutuhan khusus merupakan upaya menempatkan anak berkebutuhan khusus pada situasi yang alamiah (kondisi masyarakat umum dan sekolah umum) tanpa membatasi ruang aktivitas mereka dalam belajar di satu sekolah, sehingga anak mendapatkan kesempatan yang sebanyak-banyaknya untuk melakukan interaksi dengan teman-temannya yang reguler dan mendapatkan *feed back*

alamiah yang akan sangat baik dalam menggali kemampuan dan potensi anak berkebutuhan khusus. Konsep mainstreaming ini disebut juga dengan normalisasi, normalisasi disini bukan diartikan ABK menjadi anak normal, namun membantu ABK belajar menempatkan diri di dalam sebuah lingkungan dengan pola dan kondisi kehidupan sehari-hari yang hampir sama dengan kondisi kehidupan sehari-hari pada umumnya.

Membuat suatu pola dan kondisi kehidupan sehari-hari bagi ABK dalam implementasi pendidikan inklusif tentunya dalam rangka memberikan pembelajaran agar ABK dapat menerima keberadaan dirinya (*well being*) apa adanya dalam lingkungan yang kompleks, agar ABK dapat menerima kondisinya dan menumbuhkan rasa percaya diri, sehingga hal ini tentunya menjadi prinsip dasar dalam mengembangkan pendidikan inklusif.

Menerima kondisi keberadaan diri, menumbuhkan rasa percaya diri dan mengembangkan potensi seoptimal mungkin bagi ABK melalui pendekatan normalisasi di sekolah inklusi harus dituangkan secara administratif dalam program pembelajaran individual. Program Pendidikan Individualisasi (PPI) merupakan salah satu program untuk menjamin peningkatan mutu, kebutuhan individual dan keterlibatan, dan menjamin bahwa ABK dapat menerima program yang sesuai dengan kebutuhan khusus dan kemampuannya.

Pembahasan

Pengertian *Individualized Education Program (IEP)* atau Program Pendidikan Individualisasi (PPI)

IEP atau Program pembelajaran individual (PPI) merupakan alat yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi pendidikan sesuai dengan individu yang bersangkutan, sehingga penyusunan program bersifat personal. Smith & Luckasson (1995: 89) mengungkapkan: “*Individualized Education Program (IEP) ensures that preschoolers and school-age children receive the educational and related services required to meet their individual special needs in several areas (academic, social, speech and language, motor, vocational)*”.

IEP merupakan suatu dokumen tertulis yang dikembangkan dalam suatu perencanaan pengajaran bagi ABK sebagai hasil keputusan musyawarah dari tim yang

bekerja sama. Tim tersebut terdiri dari guru umum, guru khusus, therapist, konselor, pekerja social, orang tua, bahkan anak itu sendiri kalau memungkinkan.

IEP ini di Indonesia mulai diperkenalkan pada tanggal 21-30 Oktober tahun 1992 dalam kegiatan lokakarya yang diselenggarakan oleh Dirjen pendidikan dasar dan menengah bekerja sama dengan UNESCO di Jakarta dan dihadiri oleh seluruh kepala bidang Sekolah Dasar (SD) dari semua kantor wilayah Departemen Pendidikan dari dua puluh tujuh (27) Propinsi di Indonesia, seluruh Indonesia.

IEP dirancang dan disusun oleh tim yang terkait dalam memenuhi kebutuhan khusus anak, olehnya itu harus dipahami dan dikembangkan oleh guru-guru, baik guru pendamping khusus (GPK) maupun guru umum yang bertugas di sekolah reguler dalam pendidikan inklusif dan tenaga professional lainnya.. M. Abdurrahman (2009: 56) menjelaskan: sebelum digunakan, IEP terlebih dahulu harus dievaluasi kelayakannya oleh tim khusus yang disebut Tim Penilai Program Pendidikan Inklusif khusus (TP-3I) yang terdiri dari: Guru khusus, guru reguler, kepala sekolah, orang tua, ahli yang berkaitan dan anak itu sendiri jika memungkinkan.

Tujuh Step Perencanaan *Individualized Education Program*

Proses melaksanakan program pendidikan individualisasi meliputi tujuh langkah, yaitu: (1) *referral*; (2) *assesmen*; (3) identifikasi; (4) *analysis of services*; (5) *placement*; (6) *instructional decision making*; dan (7) evaluasi program (Smith & Luckasson, 1995: 90-102). Adapun penjelasan dari tahapan tersebut adalah:

Step pertama, *.Referral*. *Referral* atau pengalihan dalam IEP merupakan upaya untuk mengarahkan peserta didik ke dalam layanan khusus. Proses pengarahannya dimulai dengan meminta informasi/data yang berkaitan dengan kondisi anak, kemampuan dan keterbatasannya, di sekolah pengalihan atau rujukan yang diperoleh guru adalah hasil pengamatan terhadap perilaku dan hasil belajar peserta didik, sehingga guru dapat mengambil keputusan apakah anak tersebut memerlukan layanan khusus atau tidak. Pada anak usia dini, referral bisa datang dari berbagai sumber, seperti orang tua, petugas social, pengasuh dari tempat penitipan anak, pegawai puskesmas dan atau dokter, yang memberikan rujukan bahwa anak tersebut membutuhkan layanan khusus. Sebagai contoh, orang tua menginformasikan adanya keterlambatan bicara, padahal usia anak sudah tiga tahun, atau mungkin guru PAUD/TK menyampaikan ada salah satu anak yang berperilaku tidak sesuai dengan semestinya, dan memberikan

rujukan bahwa anak tersebut membutuhkan layanan khusus.

Step kedua, *Assessment*. *Assessment* adalah penilaian atau diagnosis diajukan untuk menentukan apakah anak tersebut mengalami hambatan atau kecacatan, apakah pendidikan khusus diperlukan, dan jenis layanan yang seperti apa yang dibutuhkannya. Informasi yang dikumpulkan merupakan input peserta didik yaitu berupa kemampuan awal dan karakteristik peserta didik yang menjadi acuan utama dalam mengembangkan kurikulum dan bahan ajar serta penyelenggaraan proses pembelajaran. Sesuai dengan penjelasan Situmorang dkk (2004: 9.10) guru perlu membuat analisis tentang karakteristik siswa. Artinya analisis dibutuhkan untuk mengetahui, apakah latar belakang pendidikan dan sosial budaya, untuk memungkinkan dalam menyusun program dan langkah-langkah yang harus ditempuh. Selanjutnya Situmorang menjelaskan perlunya memetakan pejaingan awal (*pre assesment*). Hal ini diperlukan untuk mengetahui tingkat kemampuan anak yang nantinya dapat menyusun sasaran dalam perilaku-perilaku khusus atau pengembangan pembelajaran dapat menentukan mana-mana yang belum dikuasai peserta didik untuk diajarkan dan mana yang sudah dikuasai. Dengan demikian, pengembangan pembelajaran akan menentukan titik berangkat yang sesuai dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik. Informasi yang dikumpulkan pada tingkat ini digunakan lebih jauh pada proses selanjutnya.

Step ketiga, *Identification*. *Identification* merupakan proses yang terjadi dalam tahap penilaian. Pertama, tes penilaian, mengidentifikasi apakah seorang peserta didik mengalami kecacatan, kedua mengelompokkan tingkat kecacatannya (misalnya: mental retardasi, ketidakmampuan belajar, perilaku menyimpang, cacat penglihatan, cacat pendengaran, kelemahan berbicara atau berbahasa). Hasil tes, pengamatan, kemudian sejarah kesehatan dan pendidikan anak disimpulkan. Hasil dan kesimpulan merupakan catatan sekolah yang sipatnya rahasia. Hasil identifikasi merupakan informasi yang berguna bagi anak dalam merencanakan program pengobatan atau pelayanan bagi anak.

Step keempat, *Analysis of Service*. *Analysis of Service* adalah dasar bagi peserta didik yang menerima IEP, yang menunjukkan kebutuhan peserta didik dalam menerima layanan pendidikan dan layanan yang terkait dengan pendidikan tersebut. Contoh seorang peserta didik membutuhkan therapy sesuai dengan hambatan yang dimilikinya, alat bantu khusus komunikasi agar dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran atau kebutuhan instruksional di bidang akademis, seperti membaca, menulis, dan

berhitung. Layanan lain yang tidak begitu diperlukan juga tetap harus dideskripsikan, seperti alat bantu berupa teknologi (Buthon in Smith & Luckasson, 1995: 97)

Step kelima, *Placement*. *Placement* adalah penempatan berupa perencanaan program individual meliputi penempatan yang sesuai dengan hasil analisis terhadap kondisi peserta didik. Penempatan mencakup dua konsep utama yaitu; pertama, lingkungan yang lebih luas atau LRE yang menjelaskan bahwa peserta didik harus digabungkan dengan peserta didik reguler sebanyak mungkin dan dilibatkan dalam berbagai aktivitas kemasyarakatan, misalnya: sebagian besar dari waktu belajar berada di kelas reguler, dan kadang-kadang di kelas khusus. Kedua, sekolah yang sesuai dalam arti bahwa sekolah yang terpisah juga tetap diperlukan.

Step keenam, *Instructional Decision Making*. *Instructional Decision Making*, artinya pada tahap instruksi pengambilan keputusan dibuat program pembelajaran yang akan diterima anak. Sasaran dan tujuan dinyatakan dalam hal yang lebih spesifik. Tujuan berfokus pada anak, dengan menunjukkan apa yang diharapkan dari anak setelah melengkapi program instruksional. Sasaran dan tujuan ditulis dengan jelas untuk setiap anak yang membutuhkan layanan khusus, dan ditentukan baik tugas maupun konsep yang akan diajarkan dan level kesuksesan yang harus dicapai.

Step ketujuh, Evaluasi Program. *Evaluasi Program* yakni program pembelajaran individual dievaluasi dengan cara berikut; Pertama, peserta didik yang menerima PPI, dievaluasi ketika peserta didik berperan aktif dalam rencana selama masa sekolah, dengan menggunakan metode pengumpulan data. Kedua, setiap PPI, peserta didik dievaluasi setiap tahunnya. Sejalan dengan tumbuh dan belajarnya peserta didik, keputusan pembelajaran yang dibuat tiap satu tahun bisa jadi tidak berlaku lagi untuk tahun berikutnya.

Komponen Komponen *Individualized Education Program*

Komponen-komponen yang disusun dalam IEP menurut *the United State Code*. PI 94-142, seperti dikutip oleh Smith D. Luckasson (1995: 114) PPI hendaknya berisi tujuh pernyataan, yaitu:

- 1) taraf kemampuan anak saat ini; 2) tujuan umum yang akan dicapai dalam setahun dan penjabarannya ke dalam tujuan-tujuan pembelajaran khusus (*instructional objective*); 3) tersedianya pelayanan khusus bagi anak; 4) perluasan

untuk mengikuti program reguler; 5) proyeksi tentang kapan dimulainya kegiatan; 6) waktu yang akan dipergunakan untuk memberikan pelayanan; dan 7) prosedur evaluasi dan kriteria keberhasilan.

Taraf Kemampuan Anak saat ini meliputi kemampuan akademik, tingkat intelegensi, kesehatan, kondisi psikologis, dan karakteristik kelainan. Selain itu juga aspek-aspek non akademik lain yang menunjukkan adanya kelainan harus diuraikan. Data yang dideskripsikan adalah semua data kemampuan dan ketidakmampuan anak baik yang diperoleh melalui tes, pengamatan, wawancara, ataupun yang diperoleh melalui cara-cara lain.

Tujuan Umum yang akan dicapai dalam setahun dan penjabarannya ke dalam tujuan-tujuan pembelajaran khusus (*instructional objective*). Penjabaran mengenai tujuan yang ingin dicapai, tujuan umum disesuaikan dengan kebutuhan individual peserta didik seperti yang dideskripsikan dalam tingkat kemampuan masing-masing, dengan memperhatikan tujuan instruksional yang terdapat kurikulum 2013 yaitu kompetensi inti yang dijabarkan dalam kompetensi dasar. Tujuan khusus memiliki kriteria sebagai berikut, spesifik, operasional dan dapat diamati/diukur.

Tersedianya Pelayanan Khusus bagi Anak. Tersedianya layanan pendidikan khusus memuat daftar layanan khusus yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan khusus peserta didik, baik dalam aspek pendidikan maupun aspek lain yang terkait. Misalnya tersedianya layanan speech therapy bagi anak dengan hambatan bicara, atau fisiotherapy bagi anak dengan gangguan gerak, dan ditentukan siapa penanggung jawab atau petugas yang menanganinya.

Perluasan Layanan untuk Mengikuti Program Reguler Komponen mengenai perluasan dan proyeksi kegiatan pengaturan pemberian layanan khusus dan layanan lain serta fleksibilitas mengikuti pelayanan reguler yang ada di sekolah tersebut. Perhatian utama terkait komponen tersebut meliputi standar toleransi pengintegrasian peserta didik dalam program-program pendidikan biasa. Hal tersebut untuk memberi kesempatan peserta didik berinteraksi dengan teman sebaya yang reguler.

Proyeksi Tentang Kapan Dimulainya Kegiatan dan Waktu yang akan dipergunakan untuk memberikan pelayanan. Waktu yang akan diberikan untuk pelayanan berisi rencana tanggal dimulainya kegiatan untuk setiap tujuan khusus, jangka waktu kegiatan dan tanggal evaluasi untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan

tersebut, juga perlu dideskripsikan metode dan kriteria pelayanan dari setiap kegiatan.

Prosedur Evaluasi dan Kriteria Keberhasilan. Prosedur evaluasi dan kriteria yang diperlukan untuk mengukur keberhasilan dan hambatan meliputi (1) ketercapaian tujuan yang telah ditentukan, dengan mendeskripsikan metode dan kriteria evaluasi; (2) keberhasilan guru dalam membantu mengatasi kesulitan belajar anak; (3) mengadakan tindak lanjut hasil evaluasi.

Individualized Education Program Individual dalam Pendidikan Inklusif

Individualized Education Program sebagai alat pembelajaran dalam pendidikan inklusi tentunya sejalan dengan Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 (2011: 19-20) tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif :a) Prinsip pemerataan dan peningkatan mutu; b) Prinsip kebutuhan individual; c) Prinsip kebermaknaan; d) Prinsip keberlanjutan; dan e) Prinsip keterlibatan

Direktorat Pendidikan Luar Biasa (2004) menjelaskan tentang komponen sekolah inklusif seperti di bawah ini :

Kurikulum. Kurikulum (bahan ajar), atau program dirumuskan berdasar pada kebutuhan dan kemampuan ABK yang diketahui berdasarkan hasil asesmen dan mengacu pada kurikulum yang berlaku. Intinya program dibuat secara individu sesuai dengan kebutuhan khusus ABK. Dalam hal ini sekolah memberikan kesempatan untuk menyesuaikan kurikulum dengan anak yang memiliki berbagai kemampuan, bakat dan minat.

Tenaga Kependidikan. Tenaga pendidik yang terlibat di sekolah inklusi meliputi tenaga pendidik (guru), pengelola satuan pendidikan, pustakawan, laboran dan teknisi sumber belajar. Idealnya di sekolah inklusif dibutuhkan tenaga profesional yang dapat membantu memberikan layanan kepada anak berkebutuhan khusus, atau untuk semua anak di sekolah, meliputi. Dokter spesialis sesuai dengan gangguan yang dialami anak, psikolog, ahli pendidikan khusus, guru anak berkebutuhan khusus sesuai dengan gangguannya, guru umum, pekerja sosial, konseler, dan terapist sesuai dengan gangguan yang dialami anak. Dalam implementasi program pembelajaran individual, tenaga-tenaga tersebut diatas merupakan tim penyusun dan pelaksana PPI sesuai peran serta masing-masing.

Sarana Prasarana. Sarana prasarana atau peralatan yang dibutuhkan disesuaikan dengan kebutuhan ABK dan keragaman peserta didik. Direktorat PLB (2004: 5-37) menetapkan peralatan khusus bagi anak berkebutuhan khusus meliputi peralatan khusus untuk gangguan penglihatan; komunikasi; intelektual; fisik-motorik; dan perilaku. Intinya sarana prasarana yang lebih memadai sesuai dengan kebutuhan ABK tentunya menjadi salah satu indikator keberhasilan penerapan PPI.

Dana. Pelaksanaan program pembelajaran individual tentunya memerlukan dukungan dana yang dapat mengakomodir pengayaan terhadap siswa berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya.

Manajemen. Implementasi PPI menggunakan manajemen sekolah inklusi yaitu manajemen input peserta didik, kurikulum, tenaga kependidikan, sarana prasarana, dana, dan lingkungan memberikan kesempatan dan peluang kepada ABK untuk dapat diterima dan mengikuti pendidikan bersama dengan anak reguler, dan anak reguler menerima dengan saling menghargai sehingga kurikulum menyesuaikan atau dimodifikasi sesuai dengan kemampuan awal dan karakteristik peserta didik dan atau keberagaman anak.

Lingkungan. Tim PPI sesuai tugas dan fungsinya bekerjasama dengan anggota masyarakat sekolah dan masyarakat umum terlibat menciptakan lingkungan inklusif dan ramah terhadap pembelajaran.

Proses Pembelajaran. Proses pembelajaran bagi keberagaman peserta didik lebih banyak memberikan kesempatan melalui pengalaman nyata, suasana yang menyenangkan dengan menggunakan strategi, kegiatan, media, dan metoda yang beragam pula sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari peserta didik. Beberapa peserta didik mungkin lebih senang belajar secara individual, sedangkan yang lainnya lebih senang secara berkelompok.

Kesimpulan

Individualized Education Program adalah alat pendidikan untuk membantu anak berkebutuhan khusus beradaptasi dalam lingkungan yang lebih alamiah, dimulai dengan lingkungan sekolah inklusi. Anak berkebutuhan khusus yang berada di sekolah inklusi tentunya akan menghadapi tantangan yang tidak kecil, sehingga pihak sekolah harus dapat membuat program yang membantu peningkatan kemampuan ABK sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

IEP merupakan program pengajaran yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik secara individual yang disusun atas kerja sama pihak sekolah, orang tua, dan anak itu sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan pembelajaran dan pencapaian kemampuan ABK. Adanya peningkatan partisipasi dan kerjasama bagi semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Program Pembelajaran Individual, merupakan aspek yang penting dalam implementasi pendidikan inklusif.

Bagi anak-anak usia dini yang diindikasikan masuk dalam program pendidikan khusus, terlebih dahulu harus melalui tiga program tertulis, yaitu: referral, asesmen, dan identifikasi. Berbagai macam pelayanan dapat diberikan pada ABK, mulai dari pendampingan sementara dari para terapis hingga pelayanan penuh, kesemua bentuk program mengikuti program umum dalam pengembangan perencanaan program individualisasi.

Daftar Pustaka

- Depdiknas. (2003). *Undang-Undang RI Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- (2004). *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Terpadu/Inklusi: Mengenal Pendidikan Terpadu*. Jakarta: Direktorat PLB.
- (2004). *Mengelola Kelas Inklusif dengan Pembelajaran yang Ramah*. Jakarta: Direktorat PLB dan UNICEF.
- (2009). *Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Luar Biasa.
- Lay Kekeh Marthan. (2007). *Manajemen Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Depdiknas-Dikti.
- Mulyono Abdulrachman. (2009). *Pendidikan Anak Berkesulitan Belajar (Cetakan kedua)*. Jakarta: Depdikbud kerjasama dengan Rineka Cipta.
- N. Dede Khoeriah, (2013). *Pengembangan Model Evaluasi Kinerja SD Penyelenggara Pendidikan Inklusif*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Situmorang, R., et al. (2004). *Desain Pembelajaran*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Smith. D.D., & Lucasson. R. (1995). *Special Education (2nd ed.)*. Needham Heights: Allyn and Bacon
- Tarmansyah. (2007). *Inklusi Pendidikan Untuk Semua*. Jakarta: Depdiknas-Dikti.